

**MODEL PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN
MELALUI KONSEP PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DI KOTA SERANG PROPINSI BANTEN**

***Yeni Widyastuti, Listyaningsih, Agus Sjafari, Arenawati**
Email: yeni_arh@yahoo.co.id

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang

Abstract : *This study was designed to determine the most appropriate model of empowerment to the poor by previously mapping the needs assessment in order to improve the welfare of society. Research recommendations is the need for programs to increase the skills through training programs in managing the group in accordance with the principles of modern management and facilitation of stakeholders. Empowerment interventions emphasize the pattern of bottom-up authority that emphasizes self-reliance of poor families to empower themselves. The emphasis in empowerment interventions not only facilitate to the physical aspect but also attention to non-physical aspects such as: the process of socialization, training process, facilitation process, program planning and empowerment evaluation process.*

Keywords: *Empowerment, Poverty, Society*

Pembangunan di suatu wilayah merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa terhindarkan. Setiap wilayah berkeinginan agar di wilayahnya terjadi pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Artinya, bahwa pembangunan yang perlu dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pembangunan fisik saja, melainkan pembangunan yang mengarah kepada pembangunan masyarakat (*community development*). Setiap

kegiatan pembangunan masyarakat berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat yang mampu memanfaatkan hasil pembangunan itu sendiri.

Kondisi tersebut ternyata sangat kontradiktif dengan kegiatan pembangunan di kota. Kondisi di kota selalu dituntut untuk mampu melakukan pembangunan, dengan maksud untuk melengkapi sarana dan prasarana kota tersebut yang memadai. Tuntutan pembangunan fisik serta penataan wilayah yang

modern dan megah mengakibatkan termarginalisasikannya sekelompok masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Melihat pembangunan wilayah perkotaan yang begitu pesat dibandingkan dengan pembangunan di daerah, semakin menjadi daya tarik masyarakat daerah untuk melakukan urbanisasi besar-besaran. Proses urbanisasi masyarakat daerah tanpa dibarengi dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai, akan menjerumuskan mereka kepada kehidupan yang marginal. Dibarengi dengan tingkat persaingan hidup yang sangat tinggi, sebagian besar dari mereka hidup dalam garis kemiskinan. Sebagian besar mereka tinggal di bantaran kali, di bawah jembatan, di pinggiran rel kereta serta di daerah-daerah kumuh lainnya. Masyarakat-masyarakat tersebut digolongkan dan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Pada sebagian besar masyarakat miskin berawal dari kondisi keluarga yang juga miskin.

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui bagaimana model pemberdayaan terhadap masyarakat miskin yang paling tepat dengan sebelumnya melakukan pemetaan *need assesment* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan diterapkan model pemberdayaan masyarakat miskin melalui konsep pembangunan masyarakat. Kegiatan penelitian ini akan memfokuskan pada proses pemetaan *need assesment* terutama dalam perspektif masyarakat miskin yang menjadi sasaran pemberdayaan.

Rancangan untuk mendesain model pemberdayaan ini mengedepankan proses *bottom-up*, artinya keterlibatan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan yaitu masyarakat miskin. Selain itu selama penelitian berjalan, penguatan terhadap penyelenggara pemberdayaan serta model yang akan diterapkan, adalah bagian penting dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan.

2.1. Kemiskinan di Perkotaan

Masalah kemiskinan di perkotaan disebabkan karena kedudukan kota-kota dalam masyarakat negara tersusun dalam jaringan yang bertingkat-tingkat dan merupakan pusat-pusat penguasaan atau pendorinasian bagi pengaturan kesejahteraan, kehidupan masyarakat negara. Sistem pendorinasian yang berpusat di kota-kota bukan hanya melibatkan aspek – aspek ekonomi, sosial dan komunikasi, dan kebudayaan. Namun dalam kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat manapun di dunia ini, manusia cenderung untuk berorientasi ke kota atau dengan kata lain bahwa orang desalah yang berorientasi ke kota dan buka orang kota yang berorientasi ke desa (Suparlan, 1995). Karena adanya orientasi pada kota, kota cenderung untuk tumbuh terus dan menjadi semakin kompleks karena kota mempunyai potensi atau kemampuan untuk menampung pendatang-pendatang baru dari pedesaan atau kota-kota dan tempat-tempat lainnya.

Adams (Suparlan, 1995) mengemukakan bahwa penambahan jumlah penduduk yang pesat dan

tidak disertai dengan pesatnya peningkatan kemajuan ekonomi, telah menyebabkan tumbuhnya kemiskinan. Beban yang terlalu berat untuk dipikul di daerah pedesaan, yang alternatif-alternatifnya untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan ekonomi guna menyambung hidup amat terbatas, telah menyebabkan adanya penyerbuan-penyerbuan ke kota secara besar-besaran oleh penduduk desa untuk mencari nafkah dan hidup di kota.

Kemampuan atau potensi kota untuk menampung pendatang-pendatang baru untuk dapat hidup dalam wilayahnya karena corak sistem ekonomi di daerah perkotaan yang lebih menekankan pada pekerjaan-pekerjaan dalam bidang industri saja dan produksi barang jadi atau setengah jadi. Walaupun alternative-alternatif untuk memperoleh pekerjaan lebih terbuka di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan, namun kemiskinan di perkotaan tetap ada atau laten karena potensi-potensi yang ada (lingkungan fisik dan alam, sistem sosial, dan kebudayaan), tidak atau

belum dapat dimanfaatkan untuk menciptakan alternatif-alternatif baru atau tidak dapat memberikan nafkah yang cukup memadai bagi sebagian besar para warganya. Kebudayaan yang ada dalam masyarakat perkotaan tersebut tidak mendorong untuk adanya kemungkinan-kemungkinan bagi pengembangan tingkat pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya yang secara obyektif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial pada warga masyarakatnya (Suparlan, 1995).

Konsep Pembangunan Masyarakat

Model pembangunan (*Style of development*) pada dasarnya mendominasi proses pembangunan nasional kita sampai akhir-akhir ini nampaknya terlalu bertumpu pada mekanisme distribusi dan alokasi yang sentralistis dalam mencoba memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. *Style of development* yang demikian cenderung menginterpretasikan “pembangunan masyarakat” dalam arti sempit.

Idealnya *Style of development* yang digunakan perlu menngacu kepada konsep pembangunan masyarakat yang sebenarnya. Dalam hal ini, konsep pembangunan masyarakat (*community development*), mengacu kepada beberapa prinsip dasar. Jim Ife (2002) dalam bukunya *Community Development*, mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip dasar dalam pembangunan masyarakat³, antara lain:

- a. *Ecological Principles*, Prinsip ini lebih menekankan kepada adanya “ecological sustainability”, yang didalamnya mengandung unsur: *Holism, sustainability, diversity, balanced development*.
- b. *Social Justice Principles*. Bahwa dalam pembangunan masyarakat tidak hanya berpihak kepada kepentingan ekologis, melainkan juga untuk membangun “*fairer world*” (pembangunan dunia yang tidak memihak/keadilan), yang di dalamnya mengandung unsur: *addreesing structural disanventage, addressing discourses of disadvantage*,

empowerment, need definiton, dan Human right.

c. *Valuing The Local Principles.*

Prinsip ini didasarkan kepada ide “perubahan dari bawah” atau “*bottom-up development*”, sebagai sentral dari ide pembangunan masyarakat, yang di dalamnya mengandung unsur: *valuing local kenowledge, valuing local resources, valuing local skills, and valuing local procesess.*

d. *Process Principles.*

Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan masyarakat, lebih menitikberatkan kepada proses dibandingkan dengan hasil, menitikberatkan kepada perjalanan dari pembangunan itu sendiri dibandingkan kepada tujuan akhir, dan yang lebih penting lagi bahwa pembangunan masyarakat harus lebih fokus kepada proses itu sendiri, yang di dalamnya mengandung unsur: *Process, outcome and vision, the integrity of process, conciousness raising, partisipation, peace and non-*

violance, inclusiveness, and community building.

e. *Global and Local Principles.*

Prinsip menekankan bahwa terdapat keterkaitan antara aspek global dan aspek lokal yang sangat signifikan yang terjadi dalam praktek pembangunan masyarakat. Pemahaman terhadap globalisasi beserta dampaknya, serta efek dari isu praktek internasional, merupakan sebuah kondisi yang sangat kritis dalam pembangunan masyarakat. Perlu adanya perhatian kepada unsur: *linking the global and the local and anti-colonialist practise.*

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menjaring data awal melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat miskin yang menerima program pemberdayaan masyarakat. Penyebaran kuesioner dilakukan dimaksudkan untuk menganalisis model/program yang telah

dilaksanakan oleh pemerintah, dan juga melakukan pemetaan masalah yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat.

Langkah kedua, hasil analisis kemudian ditindak lanjuti dengan pendekatan kualitatif. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan yaitu masyarakat yang miskin, baik yang sudah atau yang akan bekerja di sektor publik, selanjutnya pembuat kebijakan dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah (Biro Kesra, Badan Pemberdayaan Masyarakat). Hasil akhirnya diharapkan akan tercipta model pemberdayaan yang terbaik bagi kegiatan usaha masyarakat miskin. Selain itu juga dilakukan observasi dan studi dokumentasi.

Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis yaitu suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian permasalahan yang berhasil dipotret saat ini, Kota Serang sedikitnya memiliki 5 (lima) masalah penting, antara lain: keberadaan pengangguran terbuka yang masih berjumlah 16.167 KK, kemiskinan dengan jumlah 19.118 KK pra KS, kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih di bawah standar nasional yang ditandai dengan masih banyaknya warga yang buta aksara dan balita dengan gizi kurang dan buruk dengan jumlah masing-masing 4.249 dan anak, Selain itu keluarga yang baru memiliki jamban baru 48 % dan lain-lain.

Sementara itu, dua masalah Kota Serang yang lain adalah reformasi birokrasi yang harus terus dilakukan mengingat paradigma birokrasi saat ini telah berubah dari *top down* menjadi *bottom up*, untuk itu diperlukan keinginan kuat dari birokrat untuk mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani masyarakat. Masalah yang terakhir adalah kondisi infrastruktur kota yang belum memadai sehingga banjir, kemacetan, jalan rusak, penataan angkutan umum, dan

pedagang kaki lima yang masih terkesan semrawut tidaklah sulit ditemui di Kota Serang ini.

Karakteristik Kelompok terhadap Tingkat kesejahteraan keluarga

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa tingkat kesejahteraan keluarga dengan kategori rendah sebanyak 76 orang atau 39,8 persen, tingkat kesejahteraan keluarga dengan kategori sedang sebanyak 53 orang atau 27,7 persen, dan tingkat kesejahteraan keluarga dengan kategori tinggi sebanyak 62 orang atau 32,5 persen. Sedangkan untuk variabel karakteristik kelompok, kategori rendah sebanyak 63 orang atau 33,0 persen, kategori sedang sebanyak 63 orang atau 33,0 persen, dan kategori tinggi sebanyak 65 orang atau 34,0 persen.

Korelasi rank spearman antara variabel karakteristik kelompok dengan tingkat kesejahteraan keluarga adalah sebesar 0.087. Hubungan antara kedua variabel tersebut tidak signifikan karena nilai P atau Sig. sebesar 0.230 lebih besar

dari tingkat kesalahan yang digunakan yaitu 0.05 (5%).

Lingkungan Sosial terhadap Tingkat Kesejahteraan keluarga

Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa lingkungan sosial, kategori rendah sebanyak 49 orang atau 25,7 persen, kategori sedang sebanyak 81 orang atau 42,4 persen, dan kategori tinggi sebanyak 61 orang atau 31,9 persen. Hasil koefisien regresi, adalah 0,011 yang berarti variabel lingkungan sosial (x_2) berpengaruh terhadap variabel tingkat kesejahteraan keluarga (y).

Korelasi rank spearman antara variabel lingkungan sosial dengan tingkat kesejahteraan keluarga adalah sebesar 0.182. Hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan karena nilai P atau Sig. sebesar 0.012 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0.05 (5%).

Intervensi Pemberdayaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan dari jawaban responden terhadap Intervensi pemberdayaan kategori rendah sebanyak 65 orang

atau 34 persen, kategori sedang sebanyak 79 orang atau 41,4 persen, dan kategori tinggi sebanyak 47 orang atau 24,6 persen.

Hasil koefisien regresi, 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh intervensi pemberdayaan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga.

Korelasi rank spearman antara variable intervensi pemberdayaan dengan tingkat kesejahteraan keluarga adalah sebesar 0.052. Hubungan antara kedua variable tersebut tidak signifikan karena nilai P atau Sig. sebesar 0.471 lebih besar dari tingkat kesalahan yang digunakan yaitu sebesar 0.05 (5%).

Kesimpulan awal berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel karakteristik kelompok (X1) dan variabel intervensi pemberdayaan (X3) tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y), yang dibuktikan dengan hasil perhitungan statistik regresi ordinal dan uji korelasi rank spearman di atas.
2. Satu-satunya variabel independen yang mempengaruhi tingkat

kesejahteraan adalah variabel lingkungan sosial (X2).

3. Tidak berpengaruhnya intervensi pemberdayaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dimaknai secara langsung sebagai kegagalan program-program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan, sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap kebenaran kesimpulan ini.
4. Sementara tidak berpengaruhnya variabel karakteristik kelompok terhadap tingkat kesejahteraan diduga terkait erat dengan orientasi bantuan dan pelatihan yang memang cenderung tidak berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat. 2 grafik terakhir menunjukkan orientasi pemberdayaan yang cenderung pada individu dan pada aspek kognitif semata, bukan berorientasi pada keluarga serta sikap dan perilakunya.
5. Sejumlah temuan kuantitatif nampaknya perlu diverifikasi kebenarannya, seperti: kecenderungan usaha yang dikembangkan masyarakat yang

berbenturan dengan kebiasaan dan norma dalam masyarakat, serta sebab-sebab rendahnya bantuan dari lembaga pendidikan padahal hampir setiap tahun lembaga-lembaga pendidikan tinggi khususnya menyelenggarakan kuliah kerja di desa-desa tersebut.

Dari analisis regresi dan korelasi yang dilakukan di atas, terdapat beberapa hal pokok yang ada dalam penelitian ini antara lain :

Variabel karakteristik kelompok (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat kesejahteraan keluarga (Y).

Pembahasan mengenai hal tersebut bahwa secara umum karakteristik kelompok menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal tersebut dapat ditandai dengan beberapa indikator karakteristik kelompok yang dipersepsikan cukup baik oleh sebagian besar responden, antara lain: (1) sebagian besar anggota kelompok sangat mengapresiasi kapasitas pemimpin kelompok swadaya masyarakatnya masing-masing; (2) kondisi dan proses kegiatan dalam keluarga juga dalam kategori cukup

baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata responden yang menilai baik kondisi dan proses kegiatan dalam kelompok, dengan rata-rata 50 %; (3) proses interaksi dalam kelompok juga dalam kategori cukup baik. Ini Nampak dari rata-rata apresiasi responden 53 % yang menyatakan cukup baik; (4) kondusifitas keluarga tergambar dari rendahnya potensi hambatan dalam keluarga; dan (5) kondusifitas interaksi dalam kelompok tergambar dari intensitas penggunaan media komunikasi yang masih rendah, dimana komunikasi anggota lebih banyak menggunakan komunikasi secara langsung (tatap muka).

Tingginya apresiasi responden terhadap karakteristik kelompok swadaya belum menampakkan hasil yang positif terhadap tingkat kesejahteraan keluarga sebagai anggota kelompok swadaya tersebut. Kelompok swadaya yang terbentuk ternyata belum memerankan fungsinya yang signifikan terhadap usaha yang dikembangkan oleh kelompok tersebut. Tingkat kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh

tingginya karakteristik kelompok, melainkan masih banyak aspek yang mempengaruhi terhadap tingkat kesejahteraan keluarga.

Variabel lingkungan sosial (X2) berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga (Y).

Berkaitan dengan hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial keluarga memiliki keterkaitan secara langsung dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Beberapa indikator yang terkait dengan lingkungan sosial keluarga menunjukkan persepsi yang baik, antara lain :

(1) Dampak kebijakan terutama oleh pemerintah dipersepsikan positif oleh sebagian besar responden, meskipun tidak menutup bantuan dari pihak-pihak lain diluar pemerintah. Sebagian besar responden menyatakan adanya bantuan yang pernah mereka terima, baik dari pemerintah, swasta, NGO, dan pihak-pihak luar lainnya, meskipun hampir sebagian besar bantuan lebih

menitikberatkan kepada bantuan fisik berupa sarana dan prasarana. Namun responden dapat memanfaatkan secara baik bantuan-bantuan tersebut;

(2) terkait dengan ketersediaan sumberdaya ekonomi mengarah kepada terdapat bantuan yang diberikan oleh pihak lain, meskipun sebagian besar lebih banyak kepada modal bergulir dan kredit;

(3) ketersediaan sumber daya sosial lebih mengarah kepada adanya jenis pelatihan dan jenis fasilitasi informasi yang diperoleh. Khusus terkait dengan jenis pelatihan lebih banyak menekankan kepada jenis pelatihan yang berhubungan dengan pemasaran. Sedangkan jenis fasilitasi informasi yang diberikan pihak luar kepada keluarga lebih menekankan kepada informasi jenis produk. Kedua hal tersebut mendapatkan respon dan dipersepsikan sangat positif

oleh responden. Bahkan responden menempatkan kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi keberdayaan keluarganya.

- (4) Di samping kedua hal tersebut, secara internal keluarga memiliki sumber daya sosial yang sangat kuat yaitu sistem sosial dan keluarga. Sistem sosial dan keluarga berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang ada dalam tiap-tiap keluarga. Khusus terkait dengan tingkat kepercayaan yang ada dalam masing-masing keluarga menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masing-masing anggota keluarga. Tingkat potensi konflik yang ada dalam masih tergolong sangat rendah. Kondisi seperti merupakan modal besar untuk mengembangkan usaha keluarga. Dengan demikian, adanya modal sosial yang tinggi ini dipersepsikan oleh

sebagian besar responden memberikan spirit dan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

- (5) Dilihat dari indikator peran media massa terhadap usaha keluarga, sebagian besar responden menganggap bahwa peran media massa menduduki peran yang sangat penting bagi pengembangan usaha keluarga. Media massa pada dasarnya memberikan kontribusi yang sangat nyata bagi pengembangan usaha keluarga. Media massa yang dipersepsikan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan usaha keluarga adalah media elektronik khususnya televisi. Sebagian besar responden menganggap bahwa media massa elektronik banyak memberikan pengetahuan bagi tiap-tiap anggota untuk melakukan usaha keluarga. Informasi yang terkait dengan

jenis-jenis usaha yang bisa dikembangkan oleh anggota keluarga menjadi alasan utama. Kondisi tersebut membuat tiap-tiap anggota keluarga terpacu untuk mengembangkan usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

- (6) Dilihat dari indikator dukungan jaringan usaha menunjukkan bahwa sebagian besar anggota keluarga yang tergabung dalam kelompok memiliki jaringan usaha yang baik dengan pihak-pihak lain. Mereka memiliki jaringan informasi dengan pemerintah, jaringan informasi dengan lembaga pendidikan, jaringan permodalan dengan LSM, serta jaringan pemasaran dengan swasta. Kondisi tersebut merupakan sebuah “modal” tersendiri bagi tiap-tiap keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya jaringan usaha dengan pihak luar sebenarnya keluarga

miskin memiliki arah yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

- (7) Dilihat dari indikator peluang kemitraan menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin memiliki peluang kemitraan yang tinggi. Pihak lain yang menjadi mitra usaha antara lain dengan kelompok usaha lain, pemerintah, swasta, lembaga pendidikan dan lain-lain. Kemitraan dengan kelompok usaha lain yang sejenis lebih menekankan kepada perbandingan mengenai pengelolaan manajemen kelompok. Sedangkan kemitraan yang dilakukan dengan pihak pemerintah, swasta, lembaga pendidikan dan lain-lain lebih banyak berkaitan dengan kerjasama pelatihan untuk memperkuat kelompok dan pemasaran produk usaha kelompok.
- (8) Dilihat dari indikator pengaruh kultural menunjukkan bahwa

sebagian besar anggota keluarga miskin memiliki motivasi yang tinggi untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Sebagian dari mereka berusaha mengembangkan nilai-nilai yang mengarah kepada pengembangan usaha keluarga. Meskipun demikian nilai-nilai usaha yang dikembangkan dalam keluarga masih terbatas kepada usaha yang sangat tradisional. Nilai-nilai kultural yang dikembangkan menyangkut motivasi untuk berusaha, menyisihkan sebagian uang untuk dijadikan modal usaha keluarga, dan mengembangkan keterampilan-keterampilan keluarga yang mampu untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Variabel Intervensi Pemberdayaan (X3) tidak berpengaruh terhadap Variabel Kesejahteraan Keluarga (Y)

Berkaitan dengan tersebut menunjukkan tidak ada keterkaitan

secara langsung antara variable intervensi pemberdayaan (X3) dengan variabel Kesejahteraan Keluarga (Y). Kondisi seperti ini menunjukkan tidak ada teori yang mendukung dan memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dilihat dari beberapa indikator intervensi pemberdayaan (X3) yang diimplementasikan dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, dilihat dari indikator ketepatan proses pemberdayaan, Sebagian besar responden (62%) menyatakan bahwa metode pemberdayaan yang selama ini dilakukan lebih banyak menekankan kepada metode sosialisasi, 35 % menggunakan metode pelatihan, 2 % menggunakan metode pendampingan , dan 1 % menggunakan metode lain-lain yang tidak termasuk dalam beberapa metode di atas. Metode pemberdayaan ini lebih banyak menekankan kepada transformasi pengetahuan dari pihak-pihak yang berwenang di dalam memberikan informasi berkaitan dengan pengembangan usaha keluarga ataupun kelompok usaha secara

spesifik. Metode sosialisasi dalam penyuluhan merupakan tingkatan yang paling rendah, dimana masyarakat hanya lebih banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum dan dasar.

Idealnya dalam proses pemberdayaan terhadap keluarga ataupun kelompok usaha, secara substansial menekankan kepada metode pelatihan yang kemudian dilanjutkan dengan metode pendampingan yang berkelanjutan. Salah satu kelemahan dari setiap metode pemberdayaan yang dilakukan terhadap keluarga dan kelompok usaha yang selama ini dilakukan di Kota Serang adalah proses pendampingan terhadap keluarga miskin dan kelompok usaha masih sangat rendah dan terbatas. Metode pendampingan dalam proses pemberdayaan keluarga miskin sebetulnya menjamin kepastian terhadap keberlanjutan keluarga untuk melakukan kegiatan pemberdayaan secara mandiri. Namun ketika metode pendampingan itu sangat kurang dan terbatas, maka kontinuitas dari kegiatan

pemberdayaan keluarga ataupun kelompok usaha menjadi berhenti dan macet. Pihak-pihak yang mendapatkan bantuan dalam proses pemberdayaan tidak merasakan secara jelas. Pada akhirnya kegiatan pemberdayaan tersebut mati dengan sendirinya.

Kedua, dilihat dari indikator tingkat kewenangan dalam proses pemberdayaan menunjukkan tingkat kewenangan dalam proses pemberdayaan lebih mengandalkan kepada tingkat kewenangan yang formal, yaitu keluarga atau kelompok usaha masih sangat bergantung kepada pihak-pihak yang berwenang di dalam memberikan pemberdayaan seperti halnya pemerintah, swasta, LSM, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak lain. Tanpa adanya pihak-pihak tersebut, keluarga dan kelompok usaha menjadi tidak berdaya. Adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pihak-pihak tersebut, keluarga miskin dan kelompok usaha tidak memiliki kreatifitas, motivasi dan inovasi yang tinggi untuk memberdayakan dirinya sendiri. Mereka secara langsung

memposisikan dirinya untuk menjadi kelompok yang tidak berdaya.

Pada tataran masyarakat, tingkat kewenangan dalam proses pemberdayaan tersebut dapat dilihat dari seberapa besar tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat tersebut mampu menerima dan menerapkan perubahan dalam proses pemberdayaan. Ketika tokoh-tokoh kunci dalam kelompok masyarakat merasa yakin untuk menerima dan mempraktekkan usulan-usulan perubahan tersebut, maka anggota kelompok masyarakat yang lain juga secara otomatis dapat menerima dan menjalankan masukan-masukan tersebut. Secara tidak langsung, rasionalitas masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa besar tokoh kunci dapat menerima terhadap perbaikan-perbaikan tersebut. Hal ini juga terjadi dalam kaitannya dengan proses pemberdayaan terhadap keluarga miskin di Kota Serang.

Ketiga, dilihat dari indikator dukungan fasilitasi dalam kegiatan intervensi pemberdayaan menunjukkan bahwa dukungan fasilitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait misalnya saja dari

pemerintah, pihak swasta, LSM, pihak-pihak lainnya masih tergolong rendah. Sebagai contoh dalam kegiatan PNPM mandiri yang dilakukan di Kota Serang masih sangat tidak memadai. Sebesar 70 % anggaran PNPM lebih banyak diprioritaskan kepada pembangunan fisik, sedangkan 30 % anggaran PNPM digunakan untuk kegiatan usaha. Namun dari 30 % anggaran PNPN yang digunakan untuk kegiatan pengembangan kelompok, juga menunjukkan hasil yang tidak maksimal.

Saat ini keluarga miskin dan kelompok-kelompok usaha yang ada sangat membutuhkan adanya peningkatan keterampilan dan pendampingan di dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha keluarga. Segala jenis bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin dan kelompok usaha sering dipersepsikan oleh masyarakat sebagai bantuan “Cuma-Cuma” yang dapat dihabiskan tanpa dikembalikan secara bergulir. Dengan adanya dukungan dalam hal pelatihan keterampilan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan,

segala jenis fasilitasi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait seperti dari pemerintah, swasta dan pihak-pihak lainnya dapat memberikan jaminan kepastian di dalam mempergunakan dan mengelola segala jenis bantuan yang diberikan tersebut.

Kesimpulan

Menindaklanjuti hipotesis penelitian dan hasil pembahasan di atas, beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik kelompok (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai kolom *sig* pada *model fitting information* adalah sebesar 0.247 yang berarti model tersebut tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan H_0 diterima dan H_A ditolak, artinya bahwa teori yang diuji tidak cukup didukung oleh fakta. Atau dengan kata lain bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara karakteristik kelompok (X1) terhadap tingkat

kesejahteraan keluarga (Y) ternyata tidak dapat digeneralisasikan di wilayah Kota Serang.

2. Lingkungan sosial (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga (Y). Korelasi rank spearman antara variable lingkungan sosial dengan tingkat kesejahteraan keluarga adalah sebesar 0.182. Hubungan antara kedua variable tersebut signifikan karena nilai P atau $Sig.$ sebesar 0.012 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0.05 (5%). Maka H_0 ditolak dan H_A diterima, artinya teori yang diuji cukup didukung dengan fakta empiris di lapangan. Atau dengan kata lain bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan sosial (X2) terhadap tingkat kesejahteraan keluarga (Y) ternyata juga dapat digeneralisasikan di Kota Serang.

3. Intervensi pemberdayaan (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga (Y). Hal ini dapat dilihat dari output hasil perhitungan SPSS diketahui banyaknya data yang dianalisis adalah 191, dan semuanya dapat terolah karena tidak ada yang masuk kategori *missing*. Berdasarkan data dari 191 responden, diketahui bahwa tingkat kesejahteraan keluarga dengan kategori rendah sebanyak 76 orang atau 39,8 persen, tingkat kesejahteraan keluarga dengan kategori sedang sebanyak 53 orang atau 27,7 persen, dan tingkat kesejahteraan keluarga dengan kategori tinggi sebanyak 62 orang atau 32,5 persen. Sedangkan untuk variabel intervensi pemberdayaan, kategori rendah sebanyak 65 orang atau 34 persen, kategori sedang sebanyak 79 orang atau 41,4 persen, dan kategori tinggi sebanyak 47 orang atau 24,6 persen.
4. Kegiatan pelaksanaan/implementasi program pembangunan masyarakat khususnya terhadap masyarakat miskin sangat diperlukan untuk mencapai tingkat keberdayaan masyarakat, yang dilakukan melalui kegiatan Perencanaan Program melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a) Analisis Situasi; b) Menentukan masalah dan perumusan masalah; c) Menentukan tujuan program; dan d) menentukan cara/program itu sendiri.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya program peningkatan kelompok melalui program pelatihan keterampilan dalam mengelola kelompok sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Di samping itu perlu adanya program pendampingan dari pihak-pihak terkait terhadap keberlangsungan kelompok,

sehingga tiap-tiap kelompok mampu melakukan perencanaan program, pelaksanaan program serta mampu mengevaluasi kegiatan kelompok dalam mengembangkan ekonomi.

2. Kegiatan intervensi pemberdayaan yang dilakukan terhadap keluarga miskin di Kota Serang dilihat dari prosesnya diperlukan adanya pola pemberdayaan yang menekankan pada pola pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dilihat dari aspek kewenangan, kegiatan intervensi pemberdayaan lebih menekankan kepada pola kewenangan yang bersifat "bottom up" yang lebih menekankan kepada kemandirian keluarga miskin dalam melakukan pemberdayaan dirinya, pihak lain bersifat memfasilitasi. Sedangkan dilihat dari fasilitasi, perlu adanya intensitas dalam fasilitasi program pemberdayaan. Penekanan dalam intervensi pemberdayaan tidak hanya kepada fasilitasi pada aspek fisik

tetapi juga memperhatikan aspek non fisik antara lain : proses sosialisasi, proses pelatihan, proses pendampingan, proses perencanaan program serta proses evaluasi program kegiatan pemberdayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardle, Marc.1989. *Human Behavior, Communities, Organizations & Groups in Macro Social Environment. An Empowerment Approach.* Wadworth: Cale Book.
- Asngari, Pang S. 2007. *Perencanaan Program Penyuluhan,* IPB, Bogor.
- Chamber, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang.* LP3ES. Jakarta.
- Dharmawan, A. Hadi, 2002. *Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan,* Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Ilmu Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Heru Nugroho, 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan. Dalam Kemiskinan dan Kesejangan di Indonesia.* Aditya Media. Yogyakarta.
- Hikmat Gunawan. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Jim Ife, 2002. *Community Development,* Pearson Education Australia Pty Limited

- Paul, Hawkins. 1987. *Agricultural Extension*. New York: John Willey & Son, Inc.
- Payne, Robert. 1997. *Sociology* . New York: Alfred A. Knopf
- Rappaport, Frederick. 1987. *Business and Society Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. New York: McGraw-Hill Publishing Company
- Robinson, Brent D. 1994. *Community Development Strategics*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS
- Suharto, Edi dkk., (2004), *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKSPress
- Sulistiyani, Ambar T. 2004. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta Penerbit: Ghava Media